

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Anggaran TGUPP Tetap Dialokasikan

► Meski Direkomendasikan Dicoret

Palmerah, Warta Kota

Anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta sebesar Rp 19,8 miliar tetap dialokasikan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.

Padahal, Komisi A DPRD DKI Jakarta merekomendasikan anggaran itu dicoret dari pos anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta dalam KUA-PPAS.

Namun, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI akhirnya meloloskan anggaran tersebut dalam KUA-PPAS. "Masih dianggarkan, sekitar Rp 19 miliar," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Jakarta, Suharti, Senin (2/12).

Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono menuturkan, anggaran TGUPP tidak dibahas sama sekali dalam rapat Banggar. Artinya, anggaran itu disetu-



Di Banggar nggak dicolek-colek, masih tetap sama, tapi kan masih ada pembahasan nanti.

Mujiyono
Ketua Komisi A DPRD
DKI Jakarta

jui dalam KUA-PPAS 2020. Namun, anggaran tersebut bisa saja berubah saat pembahasan rancangan APBD 2020. "Di Banggar nggak dicolek-colek, masih tetap sama, tapi kan masih ada pembahasan nanti," kata Mujiyono.

Dana operasional

Pemprov dan DPRD DKI

menyepakati KUA-PPAS 2020 sebesar Rp 87,9 triliun setelah rancangannya sempat defisit sampai Rp 10 triliun. KUA-PPAS 2020 menjadi dasar Pemprov DKI Jakarta menyusun raperda tentang APBD 2020 yang akan dibahas kembali bersama DPRD DKI.

Sebelumnya, Komisi A DPRD DKI Jakarta merekomendasikan anggaran TGUPP sebesar Rp 19,8 miliar dicoret dari rancangan KUA-PPAS 2020. Komisi A merekomendasikan anggaran itu dialihkan memakai dana operasional Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sebab, TGUPP bertanggung jawab langsung kepada Anies. Komisi A juga merekomendasikan adanya evaluasi tugas pokok dan fungsi TGUPP. Sebab, jumlah anggota dan anggaran TGUPP melonjak di era Anies. Padahal, anggaran TGUPP era pemerintahan sebelumnya tidak sebesar era Anies. (**kompas.com**)